

STUDI DESKRIPTIF TENTANG KINERJA PERUM BULOG DALAM PENGADAAN DAN PENYALURAN BERAS UNTUK Mendukung STABILISASI PANGAN

Iqbal Reza

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Emergence of the terms "Food Sovereignty" is due to food issues that become too crucial in various countries in the year of 90's, then La Via Campesina came out become the international organization of farmer's struggle and also as the originator of food sovereignty organization on 1996 in the World Food Summit (WSF) congress in Roma. Food Stabilisation In Indonesia has existed since the Dutch colonial era or the Japanese colonial era but have different names and so is on the new order era, the concept of food stabilisation has already known from the massive agriculture indentification program. In this case, food stabilisation is important to be run in Indonesia in order to minimalized the poverty and hunger level in Indonesia by the procurement and distribution of rice program from Perum BULOG. The methodology used by researchers is descriptive qualitative research method where the data gathered by doing observation, deep interveiw, and documentation.Regarding the determination of the informants the writer use the purposive sampling and snowball sampling method. qualitative analysis with the data reduction step, data presentation and conclnsion.The conclusion that the writer get from this research is the performace of "Perum BULOG" considered good enough, it is seen from the target acheivement from year to year has been met and even exceed the formulated target. So that we can conclude that the performance of "Perum BULOG" seen from several research aspects considered well enough but not with the facility resources and their human resources / employees.

Keywords : *Performance, Procurement and Distribution of Rice, Food Stabilitation*

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sebuah negara agraris yang subur serta sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya yang kaya dan berkualitas, dalam sejarahnyaStabilisasi Pangan berasal dari pemasalahan-permasalahan pangan bagi negara-negara didunia yang mendasar dan menentukan nasib dari suatu negara. Pangan sendiri yaitu sesuatu alat kebutuhan bagi manusia yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, bahkan disuatu negara pangan tersebut juga sangat penting pengaruhnya karena menyangkut tentang tingkat kemakmuran rakyat di suatu negara.*La Via Campesina* atau bisa juga di sebut organisasi perjuangan petani internasional yang menjadi pedoman dan pendukung berdirinya Serikat Petani Indonesia (SPI) di tingkat internasional, demi untuk bisa menyelesaikan permasalahan pangan yang amat krusial di beberapa negara, maka *La Via Campesina* beserta dengan dukungan dari beberapa organisasi yang ada di beberapa negara memperkenalkan konsep *Food Sovereignht* atau yang biasa disebut konsep Kedaulatan Pangan yang mana didalamnya menyangkut tentang Stabilisasi Pangan pada acara *World Food Summit* (WSF) yang diselenggarakan pada deklarasi Roma pada bulan November tahun 1996.

Stabilitas Pangan adalah keadaan pangan yang stabil tanpa adanya kekurangan atau kelebihan pangan

sehingga masyarakat bias mengkonsumsinya secara terus-menerus.

Sebenarnya Indonesia sendirisudah mengenal dan memberlakukan stabilitas pangan ini pada masa penjajahan bangsa Belanda yang pada saat itu pemerintah Belanda membentuk lembaga pangan yang mengurus tentang distribusi dan logistik beras, yang diberinama *Stichting Het Voedingsmidlenfonds* (VMF) pada bulan April 1939. Pada awal tahun 30-an pemerintah Belanda memberikan kebebasan pasar dengan sedikit sekali pengendalian dari pemerintah, namun kebijaksanaan yang diambil tersebut pada umumnya bertujuan untuk menjaga agar harga beras yang dibayar konsumen cukup rendah. Saat Belanda menyerah kepada Jepang, maka VMF turut diambil alih sampai akhir Perang Dunia II. Kemudian Badan ini dikenal dengan nama Sangyobu-Nannyo Kohatsu Kaisha (SKK). Terjadilah pergeseran campur tangan pemerintah dengan mengutamakan supply untuk memenuhi kebutuhan logistik bala tentara Jepang dalam perang.

Pada jaman kemerdekaan tepatnya diawal Orde Baru, Stabilisasi Pangan juga sudah dilakukan sejak digerakkannya usaha intensifikasi pertanian secara masip, usaha pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan itu sudah dilakukan. Negara pada waktu itu membuat prioritas, bahwa yang perlu

dicukupi lebih dulu adalah makanan pokok sumber karbohidrat yaitu beras..

Sarana dan prasarana, mulai dari bendungan, saluran irigasi, jalan usahatani, penyuluhan pertanian, sarana produksi yang mudah dan murah disiapkan oleh pemerintah. Awal tahun 1968 para peneliti padi menciptakan jenis padi Peta Baru (PB), lalu varietas Pelita yang memiliki produktivitas tinggi, merupakan kesungguhan baru dalam dunia benih.

Di Indonesia maupun dunia, permasalahan tentang pangan pada saat ini masih sangat memprihatinkan seperti dikutip dari akun resmi tentang kedaulatan pangan, permasalahan tentang pangan sangat meluas, yaitu sekitar 805 jt atau satu dari sembilan orang di dunia mengalami kelaparan(*FAO - PBB*), kemudian 1 banding 4 anak di dunia kerdil (*stunting*) yang menandakan kekurangan gizi. Hasil dari data yang diperoleh Indonesia juga masih berada pada posisi rentan nyatanya sekitar 21 juta atau sekitar 8,6 % orang Indonesia mengalami kelaparan (*FAO – PBB*), dan 28 juta atau sekitar 11,37 % penduduk miskin di Indonesia tak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan sebesar 2.100 kilo kalori per hari, masalah pangan di Indonesia ini sedang dalam masa-masa yang sulit, tidak bisa dipungkiri juga di Indonesia masih banyak terdapat daerah-daerah yang rawan pangan.

Dalam pembahasan Stabilitas pangan ini sebenarnya mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Kerawanan pangan dapat berlangsung secara transisi, musiman, ataupun kronis (permanen).

1. Ketahanan pangan transisi, pangan kemungkinan tidak tersedia pada suatu periode waktu tertentu. Bencana alam dan kekeringan mampu menyebabkan kegagalan panen dan mempengaruhi ketersediaan pangan pada tingkat produksi. Konflik sipil juga dapat mempengaruhi akses kepada bahan pangan. Ketidakstabilan di pasar menyebabkan peningkatan harga pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit.
2. Musim tanam mempengaruhi stabilitas secara musiman karena bahan pangan hanya ada pada musim tertentu saja. Contohnya yaitu pada musim hujan, petani banyak yang menanam padi. Sebenarnya padi dapat ditanam pada saat musim kemarau, asalkan tersedia air irigasi untuk menyiram tanaman tersebut dan pada musim kemarau masyarakat jarang yang menanam padi sehingga tingkat produksi padi pada musim hujan tinggi dan pada musim kemarau rendah. Ditambah dengan saat ini, musim kemarau dan penghujan datangnya tidak dapat diprediksi menyebabkan rawan kerusakan tanaman dan gagal panen.

3. Kerawanan pangan permanen atau kronis bersifat jangka panjang dan persisten. Dimana masyarakat tidak mampu untuk memperoleh kebutuhan pangan setiap hari yang terjadi sepanjang waktu biasanya dikarenakan masyarakat yang ekonominya rendah termasuk pengangguran.

Dari ketiga kerawanan pangan tersebut mempengaruhi ketidakstabilan ketersediaan pangan di Indonesia yang mengakibatkan ketahanan pangan rendah. Dengan banyaknya masalah tentang stabilitas pangan ini, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan tertentu tentang pangan, salah satunya adalah ekspor dan impor bahan pangan, seperti beras. Indonesia mengimpor makanan pokok yang berupa beras yang dikarenakan banyak permasalahan yang terkait pada pertanian dalam negeri. Dengan adanya program impor, masyarakat diharapkan tidak akan mengalami kekurangan dan tercukupi bahan pangannya, sehingga stabilitas jumlah pangan serta ketahanan pangan menjadi lebih baik.

Dari beberapa masalah yang menghalangi keberhasilan dari Stabilisasi Pangan di Indonesia tersebut seharusnya pemerintah sudahlah bisa memilah-milah kebijakan dan langkah-langkah apa saja yang akan dibuat untuk keberhasilan dari stabilisasi pangan itu sendiri, pemimpin dan rakyat terkhususnya para petani berperan penting dalam hal ini mereka menjadi pemeran utama yang menentukan keberhasilan dari stabilisasi pangan yang dibentuk.

Pada saat ini Stabilisasi Pangan itu sendiri berprinsip dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang isinya menyebutkan tentang pengaturan pengadaan, penyaluran, dan mempersiapkan cadangan pangan di Indonesia. Pada realisasinya ternyata belum juga dirasakan oleh berbagai pihak, sebab harga BBM yang seringkali fluktuatif menyebabkan tingginya harga bahan pokok di masyarakat, penyaluran raskin yang tidak optimal meresahkan masyarakat kecil, penetapan HPP yang masih rendah belum mensejahterahkan petani, dan kebijakan impor bahan pangan strategis berlawanan dengan cita-cita kemandirian pangan. Selain itu lembaga stabilisasi harga saat ini masih bertumpu pada bulog yang juga dituntut untuk menghasilkan laba, sehingga distribusi beras sebagai makanan pokok rakyat Indonesia sampai saat ini belum optimal.

Masalah pangan di Indonesia ini sebenarnya sudah di atur dalam undang-undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan mengingat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang Pangan di Indonesia dengan berdasarkan asas Kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan.

Volume 5, Nomor 1, Januari – April 2017

Untuk mengurus dan menangani tentang masalah pangan ini sebenarnya ditangani oleh instansi pemerintah yaitu Perum BULOG, karena berhubungan langsung dengan Stabilisasi Pangan yaitu dalam hal pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan cadangan Pangan.

BULOG berasal dari akronim Badan Urusan Logistik yang pada sejarahnya pemerintah mendirikan BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan. Kemudian tugas BULOG berubah kembali sejak dikeluarkannya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 tahun 1968. Selanjutnya melalui Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LOI).

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003 BULOG

resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

Tugas BULOG sendiri juga merupakan amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, adapun tugas tersebut adalah pertama, melaksanakan kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas kedua, menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan tugas ketiga, menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dengan terbentuknya BULOG permasalahan pangan juga belum teratasi, berdasarkan data yang dihimpun Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), sekitar 49,5% petani di Jawa dan 1,7% petani di luar Jawa kini tidak memiliki lahan. Ironisnya, lahan pertanian pangan yang menghidupi 91,91 juta jiwa hanya bertambah dari 7,77 juta Ha pada tahun 1986 menjadi 8 Juta Ha pada tahun 2012, hanya 2,9% peningkatannya. Sementara itu Lahan perkebunan yang hanya dimiliki sedikit orang meningkat dari 7,77 Juta Ha menjadi 21,41 Juta Ha, meningkat 144%. Sedangkan 50% jaringan irigasi strategis nasional di Pulau Jawa sebagai lumbung pangan nasional rusak parah, sehingga perbaikan irigasi menjadi penting dilakukan. Revitalisasi irigasi memang menjadi andalan pemerintah baru kali ini, namun faktanya saat ini sumber-sumber air berkurang hampir di semua daerah, meskipun irigasi baik tapi sumber airnya tidak ada. Selain itu, rusaknya agroekosistem yang menyebabkan ledakan populasi hama akibat penggunaan bahan-bahan kimia dalam pertanian belum bisa teratasi. Sebab aplikasi pertanian berkelanjutan di Indonesia pada dasarnya menggunakan bahan alami dan sistem penyeimbangan ekosistem belum menjadi perhatian utama yang serius bagi pemerintah saat ini.

Dengan memperhatikan berbagai kebijakan pangan saat ini dengan fokus pada pencapaian Stabilisasi pangan, jelas terlihat bahwa peningkatan produksi menjadi yang utama. Tidak mengherankan jika infrastruktur dan mekanisasi menjadi agenda besarnya, seperti pembangunan waduk dan pembagian alat-alat pertanian di berbagai daerah. Begitu pula dengan subsidi pupuk dan benih dilakukan dengan mengoptimalkan distribusinya. Pemerintah juga memberlakukan HPP baru melalui Inpres No. 15 tahun 2015 menjadi Rp. 3.700,- yang faktanya pada saat ini di berbagai daerah, pemberlakuan HPP ini tidak berfungsi signifikan, sebab petani masih mampu menjual gabahnya dengan harga yang lebih tinggi melalui tengkulak. Mengingat kondisi di lapangan, penyerapan gabah petani oleh Bulog dilakukan dengan pembelian melalui distributor, bukan dari petani langsung. Pembelian (pengadaan) yang dilakukan Perum BULOG selama ini rata-rata mencapai sekitar

5%-9% dari total produksi beras nasional setiap tahunnya atau sekitar 1,5-3 juta ton setara beras per tahun, terbesar di antara firm yang ada di dalam industri padi/beras nasional. Dengan besarnya pembelian ini, maka HPP dapat menjadi patokan bagi pembelian gabah dan beras di pasar umum. Hal ini terlihat dari perkembangan harga gabah dan beras di pasar yang selalu di atas Harga Pembelian Pemerintah. Dana pengadaan dalam negeri yang mengalir ke pedesaan mencapai Rp. 6-7 triliun selama 4-5 bulan periode pengadaan. Berbagai kajian menyebutkan bahwa multiplier effect dari kegiatan pengadaan gabah dan beras dalam negeri diantaranya adalah mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan mendorong pembangunan pedesaan dengan mengalir sekitar Rp. 19 triliun melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja. Pengadaan juga berfungsi mendorong harga produsen agar memberi keuntungan dan insentif bagi usaha tani padi, yang juga berarti meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana Kinerja Perum BULOG dalam Pengadaan dan Penyaluran beras untuk mendukung Stabilitas Pangan?

Berdasarkan latar belakang diatas adapun tujuan dari penelitian ini ialah: Untuk bisa mengetahui bagaimana proses dan kinerja Perum. BULOG dalam Pengadaan dan Penyaluran Beras sebagai instansi yang menanggapinya, kemudian untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja perum. BULOG selama dua tahun terakhir, dan untuk mengetahui apakah Pengadaan dan Penyaluran Beras tersebut sudah tepat sasaran sebagai pendukung Stabilitas Pangan.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis nantinya, adapun manfaat yang diharapkan ialah: Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi yang objektif dan dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi Negara serta sebagai informasi bagi penelitian yang serupa dimasa yang akan datang. Kemudian hasil penelitian ini nantinya juga dapat memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat bagi instansi-instansi yang terkait agar dapat terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam ruang lingkup Pangan.

Kerangka Konseptual

Kebijakan Stabilitas Pangan

Pada pembahasan Kebijakan Stabilitas Pangan ini setidaknya kita harus mengetahui bahwa pangan merupakan elemen penting dalam keberlangsungan hidup manusia, sampai saat ini setidaknya Undang-undang Republik Indonesia dapat dijadikan acuan tentang apa yang dimaksud dengan Stabilitas Pangan itu sendiri yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Dari Kebijakan Stabilitas Pangan terdapat kata Kebijakan yang berarti suatu tindakan yang dibuat dan

dibentuk untuk mengatur ataupun menjadi sebuah patokan dalam melakukan suatu hal, Menurut Friedrich dalam Agustino mendefinisikan bahwa Kebijakan adalah Serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan menurut Anderson dalam Agustino mengemukakan bahwa Kebijakan yaitu Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Kemudian menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir mendefinisikan bahwa Kebijakan itu ialah Semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Jadi Kebijakan itu sendiri adalah Serangkaian tindakan yang dirumuskan untuk mengatur dan mengurus suatu masalah dan tindakan, baik itu dalam ruang lingkup yang luas maupun sempit agar masalah terpecahkan dan tujuan menjadi lebih terarah.

Stabilisasi menurut kamus besar bahasa indonesia kata stabilisasi berasal dari kata stabil yaitu tetap maka Stabilisasi yaitu usaha atau upaya untuk menjaga dan memelihara agar tetap stabil, Kemudian Pangan itu sendiri Menurut undang-undang RI nomor 18 tahun 2012 ialah Kebutuhan dasar manusia yang paing utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Jadi Kebijakan Stabilisasi Pangan ialah menjaga dan memelihara keadaan dimana suatu negara sudah mandiri atas pangan dan leluasa untuk menentukan kebijakan pangannya sendiri, hak-hak rakyatnya juga sudah terpenuhi dengan kualitas yang baik dan layak agar tetap stabil.

Kinerja Organisasi

Teori Kinerja Organisasi

Dalam organisasi pengukuran sebuah kinerja (*performance measurement*) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dari sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Indriyo Gitokusumo, 1997. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.

Sementara itu Bernadin dan Russel (1999) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil dari prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan

Volume 5, Nomor 1, Januari – April 2017

Bernadin dan Russel, Armstrong (1994) juga mengemukakan mengenai kinerja melihat dari esensi kinerja merupakan suatu proses bersama antara manajer, individu dan tim yang dikelola, dimana proses ini lebih didasarkan pada prinsip pengetahuan, keterampilan, kompetisi dan serta rencana kerja dan juga penempatannya.

Beberapa elemen kinerja yang dikemukakan oleh Harbani Pasolong diantaranya :

1. Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindak lanjut, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

Pada umumnya, kinerja diberi batasan sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Adapun pengertian dari para ahli kinerja organisasi antara lain :

1. Lawler dan Porter (1997), yang menyatakan bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas.
2. Prawirosentono (1999), mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
3. Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku (actors) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan.
4. Menurut Gilbert (1978), berpendapat sebaliknya, bahwa kinerja pada dasarnya adalah produk

waktu dan peluang. Peluang tanpa waktu untuk mengejar peluang tersebut bukan apa-apa. Dan waktu, yang kita tidak miliki, yang tidak memberi peluang, bahkan memiliki sedikit nilai. Perbaikan kinerja untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam menunjang peningkatan kinerja organisasi.

5. Menurut bambang kusriyanto. Definisi kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (per jam).
6. Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara bahwa “kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
7. Menurut Eztoni 1964; Pfeffer 1982; model “rational goal” atau “purposive-rational”, organisasi didesain untuk mencapai tujuan tertentu, yang berfokus pada tingkatan pada kriteria kinerja organisasi serta bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya.

Pendapat lain mengenai kinerja organisasi dikemukakan oleh Seashore dan Yuchtman merumuskan kinerja sebagai kemampuan untuk mengeksploitasi lingkungan untuk mendapatkan nilai demokratis dan mempertahankan fungsinya. Oleh karenanya, dalam konsepsi ini input ke dalam suatu organisasi dianggap lebih penting dari outputnya. Selden dan Sowa juga mengemukakan bahwa kinerja organisasi terdiri dari dua dimensi utama, yakni dimensi manajemen dan dimensi program. Dimensi manajemen meliputi karakteristik organisasi dan manajemen. Yaitu yang menggambarkan organisasi dan kemampuannya dan aksi para manajer, sementara dimensi program mengacu pada pelayanan yang spesifik atau intervensi yang dilakukan organisasi.

Jadi dapat dikatakan dari definisi di atas bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan/kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi, dan kinerja juga merupakan hasil sebuah kerja seseorang atau karyawan yang dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi.

Aspek Pengukuran Kinerja

Aspek kinerja dibuat untuk kepentingan menganalisa faktor kinerja dari sebuah organisasi, dimana aspek sebuah kinerja organisasi berguna untuk membantu dalam memahami tingkat keefektifan kinerja dari seorang pekerja atau karyawan. Dan pada akhirnya dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi proses kinerja sebuah organisasi.

Beberapa aspek kinerja yang dikemukakan oleh Miner (1990) diantaranya sebagai berikut.

1. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu, dan ketepatan dalam melakukan tugas.
2. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan beberapa jumlah produk atau jasa yang dapat dihasilkan.
3. Waktu kerja, menerangkan akan beberapa jumlah absen, keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.
4. Kerja sama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau menghambat usaha dari teman kerjanya.

Selanjutnya menurut Lohman terdapat aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja organisasi komersial antara lain

1. Sumber Daya
 - Biaya (misalnya biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pelayanan, biaya perhubungan dengan persediaan, biaya distribusi dan sebagainya).
 - Assets (biaya angkut persediaan)
2. Output
 - Keuangan (penjualan, keuntungan, return on investmen)
 - Waktu (waktu respon pelanggan, ketepatan waktu pengiriman)
 - Kualitas (keluhan pelanggan, kerusakan pengiriman)
3. Fleksibilitas
 - Fleksibilitas volume (kemampuan merespons perubahan permintaan)
 - Fleksibilitas pengiriman (tingkat kecepatan atas pengiriman)
 - Fleksibilitas campuran (kemampuan melayani berbagai jenis permintaan)
 - Produk baru dan modifikasi (kemampuan menciptakan produk baru atau memodifikasi)

Berdasarkan aspek-aspek kinerja yang sudah disebutkan sebelumnya maka dapat dilihat sejauh mana luas cakupan penilaian kinerja di sektor publik.

Kinerja individu dan kinerja pelayanan sangat erat kaitannya. Tujuan organisasi yang telah tercapai tidak lepas dari peran sumber daya yang ada dalam organisasi. Dimana sumber daya tersebut adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang berperan penting dalam menggerakkan dan menjalankan tugasnya tergantung pada struktur organisasi baik manajemen, teknologi, maupun sumber daya lain seperti peralatan yang menunjang dan keuangan yang dimiliki dalam sebuah organisasi. Berarti kinerja organisasi salah satunya ditentukan oleh kinerja sekelompok orang atau lebih sebagai pelaku dalam organisasi. Dan sedangkan pelaku organisasi itu bergantung kepada struktur, peralatan, dan keuangan, yang dimiliki dalam organisasi. Orang-orang tersebut akan memiliki rasa tanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala sifat dan perilaku yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.

Sementara itu, menurut Palmer, jenis indikator kinerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Indikator biaya (misalnya biaya total, biaya rutin)
2. Indikator produktivitas (misalnya jumlah pekerjaan yang mampu dikerjakan pegawai dalam jangka waktu tertentu)
3. Tingkat penggunaan (misalnya sejauhmana layanan yang tersedia digunakan)
4. Target waktu (misalnya waktu rata-rata yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan)
5. Volume pelayanan (misalnya perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang harus diselesaikan pegawai)
6. Kebutuhan pelanggan (jumlah volume pelayanan yang disediakan dibandingkan dengan volume permintaan yang potensial)
7. Indikator kualitas pelayanan
8. Indikator kepuasan pelanggan
9. Indikator pencapaian tujuan.

Jadi indikator kinerja merupakan sebuah kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan mencapai tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Dan indikator kinerja juga mengacu pada penilaian kinerja yang secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Dalam pencapaian yang telah ditetapkan oleh suatu badan organisasi, maka diperlukan kinerja yang baik dari seluruh komponen yang ada. Tanpa adanya kinerja yang baik, maka apa yang diharapkan dari tujuan tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Sesuai dengan unit kerja yang terdapat dalam organisasi atau perusahaan, maka masing-masing unit dinilai kerjanya, agar kinerja sumber daya manusia yang terdapat dalam unit dapat dinilai secara obyektif. Dalam institusi pemerintah khususnya penilaian sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas dan efisiensi. Karena setiap orang sebagai pelaku yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya harus lebih memperhatikan kebutuhan akan masyarakatnya yang memerlukan adanya pelayanan.

Bagi instansi pemerintah, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai kualitas, kuantitas dan efisiensi pelayanan, memberikan motivasi para aparat pelaksana, melakukan penyesuaian terhadap kinerja. Mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan akan kebutuhan masyarakatnya yang dilayani sebagai untuk menuntut perbaikan dalam pelayanan publik. Banyaknya pandangan dalam melihat kinerja pelayanan bahwa indikator yang digunakan untuk menilai kinerja dalam pelayanan publik sangat bervariasi. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan baik apabila masyarakat dapat mudah mendapatkan akses pelayanan dengan prosedur yang tidak panjang dan tidak berbelit-belit dengan menerapkan semangat kerja serta memberikan pelayanan tanpa menimbulkan adanya keluhan dari masyarakat. Maka kepuasan masyarakat bisa menjadi

Volume 5, Nomor 1, Januari – April 2017

ukuran untuk menilai kinerja sebuah organisasi dalam pelayanan publik. Berbagai macam organisasi apapun bentuk dan jenisnya selalu memperhatikan tujuan dan misi organisasi akan dibawa dalam melakukan setiap kegiatannya.

Kinerja sebuah organisasi merupakan hal yang penting untuk di cermati supaya dapat diukur untuk mengukur suatu keberhasilan organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama serta sejauh mana tingkat keberhasilan suatu organisasi yang dicapai. Maka penilaian kinerja terhadap Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo juga penting dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja organisasi yang bersangkutan sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja pada dasarnya merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang sudah direncanakan dan dijalankan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang di pengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut Soesilo dan Hessel Nogi, kinerja suatu organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
2. Kebijakan Pengelolaan, berupa visi dan misi dalam organisasi.
3. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
4. System informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivasi organisasi.

Selanjutnya proses kinerja organisasional dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut ini ada beberapa faktor-faktor yang akan dikemukakan para ahli. Hersey, Blanchard, dan Johnson menggambarkan hubungan antara kinerja dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam bentuk *Satelite Model*.

Menurut *satelite model*, kinerja organisasi diperoleh dari terjadinya integrasi dari faktor-faktor pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, proses sumber daya manusia, dan struktur. Kinerja dilihat sebagai pencapaian tujuan dan tanggung jawab bisnis dan sosial dari perspektif pihak yang memepertimbangkan.

Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan dan sistem. Sumber daya nonmanusia meliputi peralatan pabrik, lingkungan kerja, tehnologi, kapital, dan dana yang dapat dipergunakan. posisi strategis meliputi masalah bisnis atau pasar, kebijakan sosial, sumber daya manusia dan perubahan lingkungan. Proses kemanusiaan terdiri dari masalah nilai, sikap, norma, dan interaksi. Sementara itu, struktur mencakup masalah organisasi, sistem manajemen, sistem informasi dan fleksibilitas.

Kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai. untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan demikian, tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kinerja. Namun kinerja memerlukan dukungan sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik.

1. Tujuan
Merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. atas dasar tersebut, dilakukan sebuah kinerja untuk mencapai tujuan.
2. Standar
Mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan tujuan tercapai.
3. Umpan balik
Antara tujuan dan standar ada umpan balik, bersifat saling terkait umpan balik melaporkan kemajuan baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar.
4. Alat atau Sarana
Merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan.
5. Kompetensi
Merupakan prasyarat utama dalam kinerja, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. Motif
Merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada para karyawan dengan insentif berupa uang, memberika pengakuan, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, maka dalam

penelitian ini faktor-faktor yang akan di ulas lebih lanjut adalah pendapat dari Hersey, Blanchard, dan Johnson antara lain sumber daya, struktur organisasi dan pengetahuan. Faktor-faktor tersebut kan dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi. Organisasi apapun dalam melaksanakan tugasnya meskipun sudah diatur sedemikian rupa, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya dalam jumlah yang mencukupi, maka organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

b. Struktur Organisasi

Struktur pada dasarnya merupakan ciri organisasi yang berfungsi untuk mengendalikan atau membedakan semua bagiannya. Adanya struktur akan memudahkan organisasi dalam mengendalikan perilaku para pegawai, dalam arti pegawai tidak mampu membuat pilihan yang mutlak bebas dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan cara mengerjakannya. Disamping itu juga mempengaruhi perilaku dan fungsi kegiatan dalam organisasi.

John Pliffner & Owen Lane juga mendefinisikan struktur organisasi adalah hubungan antara para pegawai dan aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain serta terhadap keseluruhan bagian-bagiannya seperti tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau fungsi-fungsi dan masing-masing anggota pegawai yang melaksanakannya.

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat dan efisien. Struktur organisasi yang efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerjanya.

c. Partisipasi Masyarakat

Menurut Diana Conyers ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dianggap sifat yang sangat penting, yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program-program dari pemerintah akan gagal.
- b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program/kegiatan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mempunyai rasa memiliki terhadap program atau kegiatan tersebut.

Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi harus didasarkan pada beberapa faktor diatas karena apabila ingin mengetahui bagaimana tingkat faktor kinerja seseorang dalam

sebuah organisasi. Bagaimana cakupan bagi seseorang dalam melakukan kinerja dalam sebuah organisasi.

Indikator kinerja organisasi

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja

Menurut Menurut Hendri Simamora, penilaian kinerja adalah suatu proses denganya suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan- keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka serta memungkinkan perusahaan mengetahui seberapa baik seorang karyawan bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi.

Kinerja organisasi merupakan hal yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Freemont E. Kast dan Rosenzweight menyatakan bhawa kinerja menyangkut sejauhmana hasil dapat dicapai. Namun Kast dan Rosenzweight selanjutnya menambahkan bahwa "*Effectiveness is concerned with the accomplishment of explicit goals. What is the degree of accomplishment of objectives in key result area.?*". Dengan demikian kinerja juga menyangkut efektivitas, yaitu sejauh mana tujuan yang dinyatakan dalam petunjuk hasil dapat dicapai oleh suatu organisasi.

Tujuan dan misi organisasi publik dan perusahaan swasta adalah berbeda, meskipun keduanya sama-sama terlibat dalam pelayanan publik. Appleby (Robert Denhardt), mengemukakan bahwa agen pemerintah pada umumnya lebih mementingkan pelayanan daripada produksi atau profit. Hal tersebut mengakibatkan pengukuran terhadap pencapaian tujuan agen pemerintah menjadi sangat kabur apabila dibandingkan dengan tujuan perusahaan swasta yang biasanya dinyatakan dalam ukuran keuntungan (profit) atau produksi. Untuk menilai kinerja organisasi pemerintah, ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya lebih cocok untuk dipakai.

Seperti pendapat George Poulus dan Tannenbeum yang dikutip Steers, yang melihat bahwa pengertian efektivitas yaitu merupakan pencapaian tujuan dan rumusan keberhasilan yang tidak hanya diperhitungkan dari sasaran organisasi saja, tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Pendapat ini menurut penulis, hampir sama untuk melihat kinerja organisasi. Kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau "*The degree of accomplishment*" (Rue & Bayars dalam Keban T., 1995). Sedangkan Levine, dan kawan-kawan mengemukakan tiga indikator yang bisa

Volume 5, Nomor 1, Januari – April 2017

dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu *responsiveness*, *responsibility*, dan *accountability*. Hal ini dipertegas lagi oleh Agus Daryanto yang mengukur kinerja organisasi publik, dengan ditambah produktivitas dan kualitas layanan.

Dengan demikian indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Produktivitas,
Dengan melihat kuantitas dari produk atau jasa yang dihasilkan organisasi dengan menilai dari dokumen-dokumen yang tersedia di organisasi itu untuk membandingkan sumber daya (*resources*) yang dipergunakan dengan hasil-hasil yang diperoleh.
2. Kualitas Layanan,
Dengan melihat laporan dan dokumen penilaian penggunaan jasa atau masyarakat dan juga mengenai pelayanan yang diberikan.
3. Responsivitas
Hal ini menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam misi dan tujuannya. Hal ini dapat diperoleh dari data organisasi tentang jenis-jenis kegiatan dan program organisasi serta kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas
Dengan melihat apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas
Dengan melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Sedangkan Kumorotomo mengemukakan beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik. Kriteria tersebut antara lain :

1. Efisiensi
menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi dalam mendapatkan laba, memanfaatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas
apakah tujuan dari didirikannya organisasi dapat tercapai?. Hal ini sangat erat kaitannya dengan rasionalitas teknik dan nilai, misi atau tujuan organisasi.
3. Keadilan (*equity*)
mempertanyakan tentang distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi.
4. Daya tanggap (*responsiveness*)

organisasasi harus merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara pengumpulan data dan alat pengumpulan data. Dengan memperhatikan perumusan masalah serta tujuan penelitian ini, maka metodologi penelitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini akan mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi. Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa secara harafiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam deskriptif semata-mata tanpa perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis serta membuat ramalan. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba memberikan gambaran se jelas mungkin mengenai peran BULOG dalam memperkuat strategi Kedaulatan Pangan di Jawa Timur, berdasarkan informasi yang didapat dari informan dan tidak bergantung pada pengukuran dengan angka.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Perum BULOG Divre Jawa Timur Jalan Jendral Ahmad Yani 146-148 Surabaya Jawa Timur dan Kantor Perum BULOG Sub-Divre Buduran Sidoarjo Jawa Timur Jalan sebagai salah satu objek sasaran kedaulatan pangan selain itu BULOG juga bekerja pada bidang yang menengurusu pangan di Indonesia.

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik atau kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Pemilihan secara sengaja (*purposive sampling*) dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa informan tersebut benar-benar mengalami atau bertindak sebagai pelaku dalam pelaksanaannya. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain: Kepala Perum BULOG Divre Jawa Timur Witono, Wakil Kepala Perum BULOG Divre Jatim Yosef Wijaya, Humas Perum BULOG Divre Jatim Julia Hermawati, Kepala Perum BULOG Sub-Divre Buduran Jawa Timur, Wakil Kepala Perum BULOG Sub-Divre Buduran Jawa Timur, Humas Perum BULOG Sub-Divre Buduran Jawa Timur, Dan juga beberapa Mitra Kerja yang bekerjasama dengan BULOG

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui Observasi, Wawancara Mendalam

(*Indepth Interview*), Dokumentasi. Setelah memperoleh data yang diperlukan maka langkah berikutnya adalah menganalisa data yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tertulis yaitu dengan Reduksi data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Peneliti ini menggunakan Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Pembahasan

Kinerja Perum BULOG dalam Pengadaan dan Penyaluran Beras

Berdasarkan temuan data, selama ini kinerja Perum BULOG di Buduran Sidoarjo mengalami kenaikan dan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dalam kinerjanya dalam Pengadaan dan penyaluran beras, Perum BULOG harus bekerjasama dengan organisasi lain dalam mencapai swasembada beras tersebut dan berusaha menjadi lebih baik meskipun ada keterbatasan dalam pengelolaannya. Namun, Perum BULOG dapat sepenuhnya memenuhi target mereka bahkan melebihi dari target dan perkiran.

Kinerja Perum BULOG Divre dalam pengadaan dan penyaluran beras secara umum sudah masuk dalam kategori optimal. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan mereka dalam memenuhi target dari tahun ketahun semakin membaik dan membanggakan. Akan tetapi jika dilihat dari kurangnya fasilitas yang tersedia, bisa saja dikatakan dalam sistem pengelolaannya belum optimal, tapi kinerja yang diperlihatkan sudah bagus begitu juga dengan sangat baiknya dukungan dan partisipasi dari masyarakat sebagai mitra kerja dari Perum BULOG tersebut. Untuk menilai Kinerja Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo ini menggunakan kinerja organisasi. Untuk menilai kinerja organisasi suatu instansi, khususnya Perum BULOG dapat dilakukan dengan berbagai aspek. Dalam hal kaitannya apabila ingin menilai kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi publik maka diperlukan aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur kinerja organisasi tersebut antara lain :

1. Responsibilitas
2. Daya tanggap
3. Efektivitas

Dari semua aspek yang telah disebutkan sebelumnya, akan dibahas secara rinci terkait pencapaian keberhasilan yang telah dilakuakn oleh Perum BULOG Divre di Sidoarjo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Responsibilitas

Menurut Agus Daryanto (1995), responsibilitas adalah kemampuan yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan organisasi publik. Cakupan penilaian kinerja organisasi tidak terlepas dari bentuk respon dan kesigapan pegawai

dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pertanggungjawaban serta menanggapi keluhan masyarakat yang ada di lapangan.

Kualitas kinerja Perum BULOG di Sidoarjo sudah cukup baik dari cara Perum BULOG memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan, peraturan dan standart SOP yang berlaku. Hal ini terlihat dari diberikannya penyuluhan serta sosialisasi, dengan membuat berbagai macam program-program yang bertujuan untuk stabilisasi pangan. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum BULOG menjadikan terciptanya stabilisasi pangan di Sidoarjo. Dengan membangun banyak mitra-mitra kerja serta melakukan penyebaran personil-personi serta meningkatkan fasilitas untuk membantu para petani dan juga untuk meningkatkan kualitas kerja. Akan tetapi dengan luasnya wilayah cakupan yang harus dilayani sehingga ada keterbatasan dalam melakukan pelayanan.

Cakupan penilaian kinerja organisasi yang berkaitan dengan responsibilitas dimaksud untuk mengetahui bagaimana kualitas kinerja dengan kesigapan pegawai serta menanggapi banyaknya keluhan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, jika sudah diketahui demikian. Hendaknya diperiode mendatang, Perum BULOG mampu lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerjanya.

Daya tanggap

Daya Tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan akan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Daya tanggap diperlukan oleh suatu organisasi atau instansi yang bergerak di bidang pelayanan jasa., khususnya Perum BULOG dalam memberikan pelayanan dan mengembangkan program-program yang sesuai serta pelayanan operasionalnya.

Dalam hal ini, daya tanggap memiliki arti kemampuan Perum BULOG di Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam pengadaan dan penyaluran beras, adanya keluhan, serta pelaksanaan kinerjanya dalam memberikan pelayanan dalam mencapai stabilisasi pangan sudah sesuai. Daya tanggap dari Perum BULOG di Sidoarjo, baik dalam pelaksanaan kinerja sudah sesuai dengan jam operasional, untuk menyikapi permasalahan yang ada di lapangan sudah baik dan juga memberikan perhatian kepada masyarakat dan mitra-mitra kerja akan pentingnya harus stabilisasi pangan. Dalam pembentukan pelayanan Perum BULOG di Sidoarjo selalu mengajak masyarakat terutama mitra kerjanya, dan dirasa daya tanggap yang diberikan Perum BULOG ke masyarakat, menyampaikan sosialiasi sudah berjalan dengan sangat baik. Meskipun demikian pastinya ada kekurangan dalam setiap memberikan pelayanannya tersebut.

Efektivitas

Volume 5, Nomor 1, Januari – April 2017

Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan organisasi. Salah satu cakupan penilaian kinerja ini membahas tentang kesesuaian dan keberhasilan Perum BULOG di Sidoarjo dalam pengadaan dan penyaluran beras serta pencapaian hasil dari kegiatan. dalam efektivitas pastinya ada capaian yang ingin diwujudkan oleh Perum BULOG sudah tercapai dengan baik.

Dalam hal ini, Kinerja Perum BULOG di Sidoarjo sudah bekerja keras dalam pengadaan dan penyaluran beras sekiranya dulu hanya mampu mencapai target pas-pasan bahkan tidak memenuhi target sekarang meningkat melebihi target dengan mencapai 120-130%, hasil itu diperoleh atas kinerja Perum BULOG di Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mitra-mitra kerjanya. Untuk mencapai hasil yang maksimal Perum BULOG selalu melakukan pengawasan dan pendampingan pada mitra-mitra kerja mereka yang ada serta mengajak petani-petani yang belum bekerjasama untuk bergabung dan bekerjasama dengan Perum BULOG sebagai mitra kerja mereka. Atas capaian hasil yang sudah dilakukan oleh Perum BULOG di Sidoarjo, selama bertahun-tahun ini mendapatkan predikat terbaik dan tersukses dari semua tempat Sub-Divisi yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu dapat di katakan efektivitas Perum BULOG di Sidoarjo ini sudah bisa dikatakan sangat baik dengan menerima predikat terbaik dan tersukses setiap tahunnya membuat capain hasil yang dilakukan sudah berhasil. Sehingga untuk tahun kedepannya dapat dipertahankan atas hasil kinerjanya selama ini yang tidak lain iyalah hanya untuk menjaga kestabilan pangan di Sidoarjo itu sendiri.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perum BULOG dalam Pengadaan dan Penyaluran Beras di Sidoarjo

Meningkatnya kinerja Perum BULOG dalam Pengadaan dan Penyaluran beras untuk mendukung Stabilisasi Pangan serta belum sepenuhnya optimal dari kinerja Perum BULOG jika belum keseluruhan di indentifikasikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik itu faktor yang menghambat ataupun yang mendukung. Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo. Faktor-faktor tersebut meliputi sumber daya, struktur organisasi, dan partisipasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya yang cukup sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Organisasi apapun dalam melaksanakan tugasnya meskipun sudah diatur sedemikian rupa, namun jika tidak didukung oleh

ketersediaan sumber daya dalam jumlah yang mencukupi, maka akan sulit untuk menghasilkan kinerja yang baik. Demikian juga dengan Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disusun diperlukan berbagai sumber daya yang meliputi uang atau dana, staff atau pegawai, fisik atau fasilitas.

Sumber Daya Keuangan/Dana

Sumber daya keuangan/dana merupakan sumber daya yang amat vital yang mempunyai peranan besar di dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Semua kegiatan organisasi memerlukan dana. Kecukupan akan sumber daya keuangan/dana akan mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dilakukan secara maksimal atau tidak. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan-kegiatan Perum BULOG di Sidoarjo meliputi kegiatan peningkatan pengadaan atau penyerapan gabah dan beras, penyaluran gabah dan beras, penggilingan gabah dan beras, Raskin. Untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Dalam pembahasan sebelumnya dana yang tersedia untuk melakukan semua program kegiatan Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran Beras di Sidoarjo dikatakan sudah mampu memenuhi kebutuhan untuk mendukung kinerja Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan dana yang akan digunakan untuk kegiatan pengadaan atau penyerapan gabah dan beras, penyaluran gabah dan beras, penggilingan gabah dan beras, dan Raskin. Secara keseluruhan, jika dilihat anggaran yang di keluarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta perbaikan sarana dan prasarana mengalami kenaikan pada tahun 2015 di banding pada anggaran pada tahun 2014. Namun untuk anggaran kegiatan peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana semakin meingkat. Hal ini memang membuat pembengkakan anggaran pengeluaran Perum BULOG terkhususnya di Sub-Divisi Buduran Sidoarjo, akan tetapi hal tersebut tidak lah menghambat kinerjanya Perum BULOG karena memang sebelumnya rancangan kegiatan dan rancangan anggaran sudah di rapatkan dan dibicarakan baik-baik terlebih dahulu, sehingga nantinya hal tersebutpun tidak menghambat kinerja Perum BULOG dalam melakukan program kegiatan yang sudah di rumuskan.

Sumber Daya Staff/Pegawai

Sumber daya staff/pegawai merupakan aset yang penting dalam menentukan sukses tidaknya suatu organisasi. Untuk dapat mencapai kinerja yang baik, maka suatu organisasi, karena staff/pegawai disini

bertindak sebagai pelaku ataupun aktor yang terjun dan bergerak langsung dalam pelaksanaan program kerja. Untuk dapat mencapai kinerja yang baik, maka suatu organisasi memerlukan sumber daya staff/pegawai yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dihat dari segi kuantitas, jumlah staff/pegawai yang dimiliki kurang cukup. Dengan luasnya cakupan wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak dapat menjangkau tempat yang jauh yang berada di wilayah Sidoarjo dalam mencapai swasembada beras, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor penghambat kinerja Perum BULOG, namun pada penerapannya Perum BULOG berhasil mengatasi kekurangan mereka karena jika dilihat dari segi kualitas, sumber daya staff yang dimiliki Perum BULOG dalam pengadaan dan penyerapan beras di Sidoarjo sudah cukup baik dan memadai. Para staff telah memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sumber Daya Fisik/Fasilitas

Sumber daya fisik/fasilitas adalah fasilitas fisik atau input berupa peralatan serta fasilitas pendukung kinerja organisasi. Sumber daya fasilitas akan dilihat dari kecukupannya. Secara teori, fasilitas yang dimiliki Perum BULOG terkhususnya di Sub-Divre Buduran Sidoarjo belumlah cukup memadai.

Sumber daya fisik/fasilitas yang dimiliki oleh Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo belum mencukupi dan belum optimal. Hal ini dilihat dari masih adanya fasilitas mesin pengeringan yang tidak dimiliki oleh Perum BULOG di setiap Sub-Divrenya. Inilah yang dapat menghambat kinerja Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo, hasil panen raya biasanya itu terjadi pada bulan mei sampai april pada bulan-bulan itu kadar air dan curah hujan sangatlah tinggi. Disinilah peranan mesin pengeringan sangat lah penting karena menyangkut kualitas gabah/beras yang diserap dan disalurkan kemudian dengan ketidaktiadaan mesin pengeringan ini nantinya berimbas pada lamanya waktu yang diperlukan untuk mengeringkan gabah/beras karena pengeringannya masih manual yaitu dengan bantuan sinar matahari, imbasnya juga terkena pada harga karena HPP pada dasarnya selalu tetap sepanjang tahun dan karena kualitas gabah/beras dibawah standart, produsen bertindak dengan menyesuaikan harga dengan hasil panen yang ada jadi imbasnya berpengaruh kepada HPP yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang mesin pengeringan ini sudah ada agar kinerja dari Perum BULOG pun bisa stabil dan bahkan meningkat dari tahun-ketahun, hal ini juga yang bisa menjadi aspek terciptanya Stabilitas Pangan.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada

suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Struktur organisasi mempunyai tiga komponen dasar yaitu, formalisasi, sentralisasi dan kompleksitas. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat-tingkat diferensiasi yang ada didalam organisasi, jumlah tingkatan didalam pengorganisasian.

Struktur organisasi Perum BULOG dan di Sub-Divre Buduran Sidoarjo begitu formalis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aturan dan prosedur yang mengatur setiap orang mengenai apa yang harus dikerjakannya. Perum BULOG Divre Jawa Timur dan Sub-Divre Buduran Sidoarjo sudah memiliki aturan yang jelas. Setiap staf telah memiliki rincian tugas yang lebih spesifik dan bertanggungjawab dengan tugasnya masing-masing.

Selanjutnya adalah sentralisasi. Sentralisasi menunjukkan tersebarnya wewenang diantara pekerjaan didalam organisasi, maka Perum BULOG Divre Jawa Timur dan Sub-Divre Buduran Sidoarjo memiliki struktur organisasi yang sentralistis. Hal ini ditunjukkan dari kewenangan yang dimiliki Perum BULOG Divre Jawa Timur sebagai salah satu instansi yang menanggapi masalah pangan sebagai pelaksana hanya mampu melaksanakan kegiatan yang sudah ditentukan oleh kepala organisasi.

Komponen terakhir adalah kompleksitas. Kompleksitas menunjukkan adanya pembagian pekerjaan. Perum BULOG sudah memiliki pembagian tugas yang jelas dan tidak terlalu kompleks. Bagian tata usaha menangani kepegawaian, sekretariat, perlengkapan. Kemudian ada juga bidang Pengadaan, bidang penyaluran dan raskin dan bidang sarana dan prasarana dan penyuluhan. Masing-masing kepala bidang juga bertanggungjawab kepada kepala divisi. Organisasi dengan berbagai macam dan jenis pekerjaan serta unit yang banyak sekali dan berbeda-beda akan menimbulkan lebih banyak persoalan keorganisasian. Jenis pekerjaan Perum BULOG divre Jawa Timur dan Sub-Divre Buduran Sidoarjo, khususnya bidang pengadaandan penyerapan tidak terlalu dalam pembagian kerjanya, sehingga hal ini tidak akan meimbulkan lebih banyak persoalan dalam keorganisasian.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff yang diacu dalam Harahap, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan, tentang apa yang dilakukan dalam pelaksanaan program. Dalam kinerja organisasi sektor publik, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers sebagai berikut.:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi,

Volume 5, Nomor 1, Januari – April 2017

- kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dirasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;
 3. Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Perum BULOG divre Jawa Timur dan Sub-Divre Buduran Sidoarjo merupakan organisasi publik yang melayani masyarakat dalam hal pangan. Jadi, partisipasi masyarakat memang sangat diperlukan. Tanpa adanya itu, maka segala kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik. Dan secara otomatis, akan berpengaruh terhadap kinernyanya. Dukungan serta partisipasi masyarakat dan mitra kerja Perum BULOG di Sidoarjo terhadap pengadaan dan penyaluran beras dan pengelolaannya sangatlah baik. Itu terlihat dari keikutsetaan masyarakat sebagai mitra kerja dari Perum BULOG untuk mewujudkan stabilisasi pangan terkhususnya di Sidoarjo.

Inilah yang menjadi titik balik yang sangat bagus bagi Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo, dengan dukungan dan partisipasi dari masyarakat sebagai mitra kerjanya ini bisa menjalar kesegala aspek bukan hanya keberhasilan di bidang pangan saja ini juga berpengaruh dengan sangat baik dengan tingkat kemiskinan di Sidoarjo, dengan terjalin nya kerjasama antara Perum BULOG dan masyarakat maka tingkat kemiskinan juga berkurang kemudian angka kelaparan di Sidoarjo juga akan berkurang dengan tercapainya swasembada beras tersebut.

Kesimpulan

Kinerja Perum BULOG dalam mencapai pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo yaitu :

- a. Dalam tanggungjawab Perum BULOG sudah bisa dikatakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku sesuai juga dengan standar SOP yang berlaku dalam memberikan pelayanan dalam melakukan program kegiatan mereka, khususnya dalam bersosialisasi serta memberikan pendampingan kepada para mitra-mitra kerja mereka. Akan tetapi dalam melakukan kegiatannya Perum BULOG dinilai kurang maksimal karena keterbatasan dalam sarana dan prasarannya, yaitu pada saat penggilingan sering kali memakan waktu yang lama disebabkan karena Perum BULOG sendiri tidak memiliki mesin pengeringan, yang pada akhirnya membuat kualitas

gabah/beras menurun dan berada dibawah standard.

- b. Daya Tanggap Perum BULOG yaitu dalam pembentukan program-program Perum BULOG di Sidoarjo sudah melibatkan masyarakat, dimana dalam melakukan Pengadaan atau penyerapan gabah/beras melibatkan masyarakat sebagai mitra kerja mereka dan pada saat melakukan Penyaluran beras yaitu Raskin, Perum BULOG juga selalu cepat dan tanggap dalam menangani keluhan dari masyarakat.
 - c. Untuk Efektivitas dari kinerja Perum BULOG Divre di Sidoarjo juga sudah mengalami peningkatan. Dalam pencapaian program dari capaian tersebut setiap tahunnya Perum BULOG Divre terkhususnya di Sidoarjo selalu mencapai target dan bahkan dari tiga tahun terakhir Perum BULOG juga terus mengalami pencapaian yang melebihi target di Sidoarjo. Ini dibuktikan dengan usaha Perum BULOG untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka di setiap daerah yang menjadi cakupan mereka dengan mendapatkan hasil yang baik.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo yaitu :

- a. Faktor sumber daya dana. Sumber daya dana bisa mempengaruhi dan menghambat kinerja Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo. Hal ini disebabkan adanya dana ataupun biaya untuk pengeluaran pembuatan program-program yang dilakukan oleh Perum BULOG, yaitu dengan adanya peningkatan jumlah anggaran di tahun 2015 mengalami peningkatan di banding tahun 2014, hal ini semata karena Perum BULOG melakukan peningkatan target di setiap daerahnya.
- b. Sumberdaya staff/pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dilihat dari segi kuantitasnya, jumlah staff yang dimiliki dirasasudah mencukupi di Divisi Regional akan tetapi tidak mencukupi di Sub-Divre Buduran Sidoarjo. Karena dari beban tugas yang diterima dan dari luasnya cakupan wilayah pelayanan, Perum BULOG dapat mengatasinya karena disetiap daerahnya perum BULOG memiliki Sub-Divre yang mengemban tugas dari program kegiatan yang mereka rumuskan.. Dari segi kualitas sumber daya yang dimiliki oleh para staf sudah cukup baik dari tingkat pendidikan, pengetahuan, serta dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
- c. Sumber daya fasilitas. Tersedianya fasilitas akan sangat mempengaruhi tingkat kinerja dari Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo. Fasilitas yang ada masih belum mencukupi untuk

meningkatkan kualitas gabah/beras yang mereka salurkan. Hal ini cukup menghambat kinerja Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras terkhususnya di Sidoarjo.

- d. Faktor yang kedua adalah Struktur organisasi. Struktur organisasi Perum BULOG sangat formalis dan sudah memiliki pembagian tugas kerja masing-masing yang jelas dan tidak terlalu kompleks. Jenis pekerjaan dalam Perum BULOG Divre Jawa Timur tidak terlalu banyak pembagiannya, sehingga tidak akan menimbulkan lebih banyak persoalan keorganisasian. Dan tentu saja menjadi faktor pendukung. Meskipun demikian struktur organisasi Perum BULOG juga bersifat sentralistis, tentu saja bisa menjadi kendala dan berakibat pada memperlambat Perum BULOG dalam menindak lanjuti berbagai masalah yang ada.
- e. Faktor ketiga adalah partisipasi masyarakat. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang dirumuskan oleh Perum BULOG dinilai sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari banyaknya petani-petani yang bekerjasama dengan Perum BULOG sebagai mitra kerja mereka.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kinerja Perum BULOG dalam pengadaan dan penyaluran beras di Sidoarjo, maka akan diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai instansi dan perusahaan umum milik pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya di tingkatkan lagi dalam menangani keluhan dari masyarakat dan mitra kerja. Lebih memperluas pengawasan terhadap masyarakat sebagai mitra kerja dan terus ditingkatkan agar untuk tahun-tahun yang akan datang bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi baik dari Pengadaan maupun penyaluran. Dan untuk mengatasi permasalahan yang akan datang diharapkan Perum BULOG lebih meningkatkan kerjasama dengan lembaga, organisasi, maupun dari instansi lain dikarenakan cakupan wilayahnya yang luas, dan agar nantinya misi Kedauatan Pangan dari pemerintah bisa terwujud.
2. Perlunya peningkatan jumlah sumber daya manusia dengan merekrut untuk penambahan jumlah staff yang ada dilapangan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk capaian kinerja, karena dengan jumlah pegawai dan staff yang banyak bisa menghemat waktu dan mencapai hasil yang lebih maksimal.
3. Sumber daya fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana sangatlah perlu ditingkatkan, terutama mesin pengeringan, karena dengan adanya mesin pengering yang cukup dan memadai tingkat kualitas dari gabah/beras yang diserap bisa meningkat.

Struktur organisasi Perum BULOG Divre Jawa Timur dan Sub-Divre Buduran Sidoarjo masih sentralistis, sehingga hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai. Maka dalam hal ini diperlukan kewenangan yang lebih atau desentralisasi kekuasaan agar dapat cepat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan.

Daftar Pustaka

- Ardana, Komang, dkk. 2008, *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hartoyo, S. 2000, *Kajian Stabilisasi Produksi dan Harga* Diambil dari buku Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang. 2001.
- Kusdi. 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*. Malang: Salemba Humanika.
- Mahsun, Mohamad. 2005, *Pengukuran Kinerja sektor publik*. Yogyakarta: Edisi Pertama.
- Meleong, Lexy. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2007, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sjahrir. 1988, *Kebijakanan Negara, Konsistensi dan Implementasi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: LP3ES
- Sugiyono. 2005, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.